JTAMPS: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jtamps/index
Vol.05, No. 2 (Oktober, 2025), pp. 501-511
e-ISSN: 2776-2963 p-ISSN: 2776-3110

Ketimpangan Sosial Ekonomi Dalam Dinamika Politik Kontemporer

Muhammad Fajar[1], Syamsu Kamaruddin[2], A. Octamaya Tenri Awaru[3]

[1] Universitas Negeri Makassar; mf3007532@gmail.com
[2] Universitas Negeri Makassar; syamsukamaruddin@gmail.com
[3] Universitas Negeri Makassar; a.octamaya@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Socioeconomic inequality, democracy, contemporary politics

Article history:

Received 2025-05-10
Revised 2025-05-12
Accepted 2025-05-15

ABSTRACT

This study explores socioeconomic inequality within the context of contemporary political dynamics as a multidimensional issue with broad implications for social stability and democratic quality. Inequality is reflected not only in the unequal distribution of wealth and access to education, healthcare, and employment, but also in political participation and representation in public decision-making. Using a qualitative approach through a literature review method, this research analyzes various relevant academic and media sources. The findings reveal that rising inequality weakens social cohesion, erodes public trust in state institutions, and fuels the emergence of populism and authoritarian tendencies. Furthermore, inequality strengthens the dominance of economic-political elites in democratic systems, leading to a form of exclusive democracy that remains procedural but loses its representative substance. Thus, addressing socioeconomic inequality is not only an economic responsibility but also a crucial political strategy to safeguard the sustainability of an inclusive and just democracy.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci :

Ketimpangan sosial ekonomi, demokrasi, politik kontemporer

Article history:

Diterima 2025-05-10
Revisi 2025-05-12
Diterima 2025-05-15

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ketimpangan sosial ekonomi dalam konteks dinamika politik kontemporer sebagai isu multidimensional yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan kualitas demokrasi. Ketimpangan tidak hanya tercermin dalam perbedaan distribusi kekayaan dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan, tetapi juga dalam partisipasi politik dan representasi dalam pengambilan keputusan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber pustaka terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan yang terus meningkat memperlemah kohesi sosial, memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara, dan memicu munculnya populisme serta kecenderungan otoritarianisme. Ketimpangan memperkuat dominasi elite ekonomi-politik dalam sistem demokrasi, menciptakan demokrasi eksklusif yang prosedural namun kehilangan substansi representatifnya. Mengatasi ketimpangan sosial ekonomi tidak hanya merupakan tanggung jawab dalam ranah ekonomi, tetapi juga merupakan strategi politik penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Penulis Koresponden :

Muhammad Fajar

Universitas Negeri Makassar 1; mf3007532@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan global kontemporer, ketimpangan sosial menjadi isu yang semakin kompleks dan krusial di banyak negara. Ketimpangan ini tercermin dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, akses terhadap fasilitas kesehatan, peluang kerja, dan dimensi kehidupan lainnya. Transformasi sosial merujuk pada proses perubahan yang terjadi dalam tatanan struktur, sikap, serta sistem nilai dalam masyarakat. Sementara itu, ketimpangan sosial merupakan fenomena yang lazim ditemukan di berbagai negara, ditandai oleh distribusi yang tidak merata atas sumber daya, peluang, dan kekuasaan di antara individu atau kelompok sosial tertentu (Maria, H., Laurens, I., Patoo, H., & Sapa, A. 2023). Ketimpangan sosial merujuk pada kondisi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam interaksi langsung maupun dalam struktur kelompok. Ketimpangan ini sering muncul akibat distribusi yang tidak merata terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam masyarakat (Irawan, A. D. 2022). Kesenjangan tersebut umumnya tampak nyata dalam aspek finansial, terutama dalam bentuk perbedaan kekayaan, sehingga sering dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi. Di era sekarang, ketimpangan status sosial dan peluang dalam masyarakat menjadi semakin mudah dikenali.

Ketimpangan sosial mencerminkan perbedaan yang mencolok dalam akses terhadap berbagai sumber daya dan peluang di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan ini tampak dalam aspek-aspek seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Sebagian orang memiliki keistimewaan dalam menikmati layanan publik yang lebih baik, sementara yang lain terjebak dalam kondisi sosial yang membatasi mobilitas mereka. Ketidaksetaraan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, termasuk

status sosial, kebijakan publik yang tidak merata, serta diskriminasi berdasarkan identitas ras, gender, atau etnis. Ketimpangan sosial yang terus berlangsung dapat melemahkan solidaritas sosial dan menciptakan jurang pemisah yang menghambat partisipasi kelompok- kelompok marjinal dalam kehidupan sosial secara menyeluruh (Hababil et all., 2024). Ketimpangan sosial membawa dampak yang luas dan dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap stabilitas serta kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan yang tinggi kerap dikaitkan dengan meningkatnya konflik sosial, kriminalitas, serta ketidakpuasan publik yang dapat mengganggu tatanan sosial.

Selain itu, ketimpangan sosial dapat membatasi mobilitas antar kelas, di mana individu dari kelompok sosial bawah cenderung kesulitan untuk meningkatkan posisi sosial mereka. Kondisi ini memperkuat pola ketidakadilan antargenerasi yang sulit diatasi. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, seperti penerapan kebijakan yang mendorong pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial yang inklusif (Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. 2020).

Ketimpangan sosial-ekonomi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ketidaksetaraan ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan distribusi pendapatan. Di Indonesia sendiri, perbedaan antara kelompok kaya dan miskin masih tampak jelas, dengan sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oleh kelompok kecil dalam populasi (Wardoyo, Y. A. 2024). Situasi ini tidak hanya memperbesar jurang antar kelompok sosial, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial seperti meningkatnya kriminalitas, penurunan kualitas hidup, dan ketidakstabilan sosial. Oleh sebab itu, mengatasi ketimpangan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih merata, adil, dan sejahtera.

ketimpangan sosial ekonomi tampak nyata dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Sebagian kecil elite ekonomi menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara sebagian besar masyarakat masih bergelut dalam keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar (Ramadhan, M. 2018). Akses terhadap pendidikan

berkualitas dan layanan kesehatan yang layak masih menjadi tantangan serius, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan terpinggirkan. Ketimpangan ini memperkuat stratifikasi sosial dan memperlemah mobilitas sosial, sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan. Dinamika politik kontemporer justru kerap memperparah ketimpangan sosial ekonomi. Politik yang didominasi oleh kelompok elit seringkali menghasilkan kebijakan publik yang lebih menguntungkan segelintir golongan, sementara aspirasi masyarakat bawah kurang terwakili secara proporsional (Kogoya, et all., 2025).

Fenomena oligarki politik, politik uang, dan korupsi turut memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan sumber daya negara (Nugroho, M. B. A., & Hosnah, A. U. 2024). Hal ini menimbulkan eksklusi sosial dan mempersempit ruang partisipasi masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kebijakan yang dibuat tidak berorientasi pada keadilan sosial, ketimpangan cenderung menjadi warisan yang terus berlanjut. Ketimpangan sosial ekonomi juga berdampak serius terhadap stabilitas sosial dan kohesi nasional (Polii, J. L. S. S. 2024). Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan memperlemah legitimasi pemerintahan. Upaya untuk mengurangi ketimpangan bukan hanya menjadi tanggung jawab ekonomi, tetapi juga merupakan agenda politik yang mendesak. Melihat kompleksitas persoalan ini, penting untuk menganalisis ketimpangan sosial ekonomi dalam kerangka dinamika politik kontemporer. Dengan demikian, pembahasan mengenai ketimpangan sosial ekonomi dalam konteks politik masa kini menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, setara, dan demokratis.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau studi pustaka, di mana pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, berita, dan internet yang relevan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif. Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber kepustakaan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Selanjutnya, penelitian ini mengklasifikasikan

data yang telah dikumpulkan berdasarkan formula penelitian yang dirumuskan. Data yang telah dikumpulkan diolah dan referensi yang relevan dikutip untuk disajikan sebagai temuan penelitian. Data tersebut kemudian diabstraksikan untuk memperoleh informasi yang utuh dan diinterpretasikan secara mendalam. Proses ini bertujuan menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Hasil sintesis dari kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketimpangan sosial ekonomi dalam dinamika politik kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan pendapatan telah menjadi realitas yang menonjol dalam lanskap ekonomi global, dengan konsekuensi yang meluas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Lebih dari sekadar masalah ekonomi, ketimpangan ini berdampak langsung terhadap struktur sosial dan dinamika politik di banyak negara. Ketidakseimbangan dalam pendapatan menciptakan jurang pemisah antara kelompok masyarakat, yang dapat memicu ketegangan sosial, memperlemah kohesi sosial, serta meningkatkan potensi konflik. Ketika akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi hanya tersedia bagi segelintir orang, kepercayaan terhadap institusi publik pun menurun (Supriawan, E. 2024). Hal ini pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berkembang menjadi instabilitas politik, seperti unjuk rasa, polarisasi masyarakat, dan bahkan kerusuhan. Ketimpangan pendapatan tidak hanya menjadi indikator ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga ancaman nyata terhadap keberlanjutan sistem sosial dan kestabilan politik dalam jangka panjang.

Ketimpangan pendapatan bukan hanya sekadar perbedaan dalam hal ekonomi, melainkan mencerminkan akar permasalahan struktural yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan politik suatu negara (Rahman, H. 2017). Dalam masyarakat yang mengalami kesenjangan pendapatan tinggi, rasa ketidakadilan menjadi lebih menonjol. Individu dari kelompok ekonomi bawah sering kali merasa bahwa sistem tidak berpihak pada mereka, menciptakan alienasi dan menurunnya partisipasi dalam proses demokrasi. Rasa ketertinggalan ini dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, seperti pemerintah, partai politik, dan sistem hukum. ketimpangan ekonomi berpotensi

memperkuat polarisasi sosial dan politik. Kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan cenderung mudah terdorong oleh narasi populis yang menjanjikan perubahan radikal, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak jangka Panjang (Triatmo, A. W. 2022). Hal ini dapat memicu munculnya gerakan ekstremisme, baik dari sisi kiri maupun kanan spektrum politik, yang mengancam tatanan demokratis dan pluralistik. Ketegangan ini diperparah jika ketimpangan dikaitkan dengan faktor identitas lain, seperti etnis, agama, atau wilayah, yang dapat memperbesar potensi konflik horizontal.

Secara sosial, ketimpangan memperlemah kohesi dan solidaritas antarwarga. Masyarakat yang terpecah dalam kelas-kelas sosial yang kaku menjadi kurang toleran terhadap perbedaan, dan ini mengurangi ruang dialog serta kompromi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kualitas kehidupan demokratis, di mana kebijakan publik cenderung hanya menguntungkan elite ekonomi dan politik. Ketika ketimpangan dianggap sebagai hal yang normal atau tidak dapat diubah, maka legitimasi sistem pemerintahan pun akan tergerus. Ketimpangan yang terus meningkat dapat menjadi sumber ketidakpastian yang serius. Protes massa, kerusuhan, dan bahkan ketegangan antarkelompok bisa muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil (Rosidi, S. 2021). Dalam konteks ini, negara akan menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk pengendalian konflik sosial ketimbang pembangunan yang produktif. Akibatnya, kemajuan ekonomi yang seharusnya dinikmati bersama justru terhambat oleh ketidakstabilan yang bersumber dari distribusi pendapatan yang tidak merata.

Dalam beberapa literatur yang ada, pemahaman mengenai ketimpangan telah berkembang dari sekadar persoalan distribusi pendapatan menjadi isu yang lebih kompleks dan multidimensional. Pendekatan baru melihat ketimpangan sebagai fenomena sistemik yang berakar pada institusi sosial, kebijakan negara, serta dinamika globalisasi ekonomi. Menurut Milanovic (2016) dan Piketty (2020), ketimpangan pendapatan saat ini tidak hanya mencerminkan jurang ekonomi, tetapi juga menjadi indikator ketimpangan kekuasaan dan representasi politik. Artinya, mereka yang memiliki kekayaan besar tidak hanya mendominasi pasar, tetapi juga memengaruhi arah kebijakan publik, menciptakan siklus yang

memperkuat ketimpangan itu sendiri.

Pendekatan interseksional dalam melihat dampak ketimpangan. Ketimpangan tidak bekerja secara terpisah, tetapi beririsan dengan faktor-faktor lain seperti gender, etnisitas, dan lokasi geografis. Studi oleh Oxfam (2023) menunjukkan bahwa perempuan dan kelompok minoritas sering kali menjadi korban utama dari sistem ekonomi yang tidak adil. Ketimpangan ini, ketika tidak ditangani, menciptakan akumulasi ketidakpuasan yang menjadi bahan bakar ketidakstabilan sosial dan politik. Selain itu, perspektif baru juga mulai mengaitkan ketimpangan dengan erosi demokrasi. Berbagai penelitian mutakhir (misalnya oleh Acemoglu & Robinson, 2019) menyoroti bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi melemahkan partisipasi warga negara dalam sistem demokratis, karena mereka merasa suara mereka tidak lagi berpengaruh. Hal ini membuka ruang bagi munculnya illiberal democracy sistem pemerintahan yang secara formal demokratis, namun dijalankan dengan cara otoriter sebagai respons atas keresahan publik.

Dalam konteks sosial-politik global saat ini, terlihat bagaimana media digital dan algoritma memperkuat dampak ketimpangan. Ketimpangan ekonomi menciptakan jurang dalam akses terhadap informasi dan teknologi, yang kemudian berujung pada fragmentasi informasi. Ini memperparah polarisasi sosial dan memperkuat disinformasi yang bisa memicu ketegangan politik. Literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat miskin menyebabkan mereka lebih rentan terhadap manipulasi opini publik, memperkuat ketimpangan politik dan memperlemah demokrasi deliberatif. Ketimpangan sosial ekonomi tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan distribusi kekayaan atau akses terhadap sumber daya, melainkan sebagai gejala struktural yang menyentuh jantung stabilitas politik dan kualitas demokrasi (Winarno, B. 2014).

Ketimpangan yang semakin tajam menciptakan polarisasi sosial, melemahkan solidaritas warga, dan memicu siklus ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Fenomena ini bukan hanya mengganggu tatanan sosial, tetapi telah menjadi faktor kunci dalam erosi demokrasi yaitu proses perlahan di mana prinsip-prinsip demokratis mulai dikompromikan, bahkan dari dalam sistem itu sendiri (Budiatri, A. P., & Wiratraman, H. 2022). Dalam sistem politik demokratis, legitimasi

pemerintah bertumpu pada partisipasi warga dan rasa keadilan dalam kebijakan publik. Ketika ketimpangan merajalela dan hanya segelintir elite ekonomi yang memiliki akses pada kekuasaan dan pengaruh politik, maka muncul kondisi yang disebut sebagai demokrasi eksklusif. Di sini, proses demokrasi tetap berlangsung secara prosedural (misalnya melalui pemilu), tetapi substansinya mulai kosong karena tidak lagi mencerminkan kepentingan mayoritas rakyat. Kondisi ini diperburuk oleh dinamika globalisasi, disrupsi teknologi, dan dominasi korporasi besar dalam lanskap politik ekonomi.

Akses informasi yang timpang, kontrol terhadap media oleh kelompok-kelompok berkepentingan, serta lemahnya literasi politik menjadikan masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi dan propaganda populis. Ini mendorong naiknya rezim yang secara formal demokratis tetapi menggerus kebebasan sipil, independensi lembaga, dan akuntabilitas public proses yang disebut oleh para ilmuwan politik sebagai authoritarian backsliding. Ketimpangan sosial ekonomi tidak hanya mengancam stabilitas politik, tetapi juga menjadi motor utama dari kemunduran demokrasi. Kekecewaan terhadap sistem yang tidak adil memberi ruang bagi tokoh-tokoh populis untuk memanfaatkan kemarahan publik, sering kali dengan retorika antielite, anti-imigran, atau anti-demokrasi liberal (Denny, J. A. 2021). Dalam jangka panjang, ketimpangan ini berpotensi menciptakan negara yang represif, di mana hak- hak minoritas diabaikan, kritik dibungkam, dan kekuasaan terpusat pada satu kelompok dominan. Membahas ketimpangan sosial ekonomi dalam lanskap politik kontemporer tidak dapat dipisahkan dari tantangan besar terhadap keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Mengatasi ketimpangan bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi sebuah strategi politik untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan representatif.

4. KESIMPULAN

Ketimpangan sosial ekonomi merupakan persoalan multidimensional yang berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan kualitas demokrasi. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik menciptakan jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat mobilitas sosial, tetapi

juga melemahkan solidaritas sosial dan memperbesar potensi konflik, terutama ketika kebijakan publik lebih berpihak pada elite ekonomi dan politik. Dalam dinamika politik kontemporer, ketimpangan menjadi faktor utama yang mempercepat erosi demokrasi. Ketika masyarakat merasa terpinggirkan dari proses politik dan manfaat pembangunan, kepercayaan terhadap institusi negara pun menurun. Situasi ini membuka ruang bagi munculnya populisme, eksklusi sosial, dan kecenderungan otoritarianisme. Mengatasi ketimpangan bukan hanya agenda sosial-ekonomi, melainkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang inklusif, adil, dan representatif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty. New York: Penguin Press.

Arwiyah, M. Y. (2012). Status sosial ekonomi dan kualitas partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(1), 85-92.

Bahari, Y. (2010). Karl marx: sekelumit tentang hidup dan pemikirannya. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 1(1).

Brutu, S., Nainggolan, J. A., Sembiring, G. R., Trisna, W. A., Nainggolan, G., Andini, P., & Prayetno, P. (2024). Analisis Hubungan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Warga Negara (Studi Kasus di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan). Indonesian Journal of Education and Development Research, 2(1), 137-146.

Budiatri, A. P., & WIRATRAMAN, H. (Eds.). (2022). Demokrasi tanpa demos: refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia. Lp3es.

Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Denny, J. A. (2021). Jatuhnya Soeharto dan transisi demokrasi Indonesia. Cerah Budaya Indonesia.

Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). Peranan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Jombang Jawa Timur. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 4(1), 1-20.

Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. Journal of Macroeconomics and Social Development, 1(4), 1-9.

Irawan, A. D. (2022). Pengaruh pandemi dalam menciptakan ketimpangan sosial ekonomi antara pejabat negara dan masyarakat. Jurnal Citizenship Virtues, 2(1), 251-262.

Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan penyusunan studi literatur. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto, 1-9.

Kogoya, W., Lefaan, A., Jamal, O., & Timisela, M. (2025). Buku Ajar Sosiologi Politik.

Penerbit Widina.

Maria, H., Laurens, I., Patoo, H., & Sapa, A. (2023). Transformasi sosial melalui lensa teologi: Memahami peran agama dalam mengatasi ketimpangan sosial pada konteks kontemporer. Kingdom, 3(2), 108-121.

Milanovic, B. (2016). Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization.

Cambridge, MA: Harvard University Press.

Nugroho, A. C. (2021). Teori utama sosiologi komunikasi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, 2(2).

Nugroho, M. B. A., & Hosnah, A. U. (2024). Problematika Oligarki Dalam Partai Politik Yang Memicu Lahirnya Tindak Pidana Korupsi. Palar (Pakuan Law review), 10(2), 31-42.

Oxfam International. (2023). Survival of the Richest: How We Must Tax the Super-Rich Now to Fight Inequality.

Piketty, T. (2020). Capital and Ideology. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Polii, J. L. S. S. (2024). Keadilan dalam inklusi menyuarakan hak-hak minoritas di tengah dinamika global. Gema Edukasi Mandiri.

Purnama, R., & Dewi, M. T. F. (2020). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2018. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(2), 245-256.

Rahman, H. (2017). Potret pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia dalam tinjauan ekonomi politik pembangunan. Ilmu dan Budaya, 40(55).

Ramadhan, M. (2018). Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional. LKiS.

Raya, D., Rizky, R., Robiatul, C., Az-zahra, J., Azizah, W., & Rafa, M. (2024). Sumber kekuasaan dalam negara: Analisis berdasarkan teori konflik Karl Marx. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(2).

Rosidi, S. (2021). Sakban rosidi: membaca berlensa sosiologis, menulis bernalar pedagogis.

Publica Indonesia Utama.

Supriawan, E. (2024). Strategi mengatasi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Circle Archive, 1(5).

Syarif, M. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota 2015 di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. E-Journal Pemerintahan Integratif, 4(4), 547-561.

Triatmo, A. W. (2022). Resistensi Petani Terhadap Hegemoni Kapitalisme, Studi Kasus Pemberdayaan Sanggar "Rojo Lele" di Delanggu Klaten.

Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama, 3(1), 32-48.

Wardoyo, Y. A. (2024). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Sistem Ekonomi Terbuka Periode 2011-2020. Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan, 12(1), 165-186.

Winarno, B. (2014). Dinamika isu-isu global kontemporer. CAPS.